



PUTUSAN

Nomor 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, DESA KAMPUNG MELAYU BARAT, TELUK NAGA, KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, DESA KAMPUNG MELAYU BARAT, TELUK NAGA, KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa, pada tanggal 12 November 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx, Sesuai dengan kutipan akta Nikah No.1073/30/XI yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 2010.

Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jln. Teladan 2/ makam Kp pondok Kuburan RT 002/ 06 Desa Kp Melayu Barat Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Tangerang.

Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bercampur atau berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan

5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2018, karena ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun (harmonis) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh antara lain:

Antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat dan Penggugat belum Dikaruniai Keturunan

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga yang sakkinah, mawaddah warohmah, selalu ada perbedaan pendapat

Tergugat Mempunyai wanita idaman lain (Wil)

Tergugat memiliki sifat emosi, dimana jika terjadi perselisihan sering berkata kasar kepada penggugat.

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan Januari 2020, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-isteri

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu telah diusahakan dimusyawarahkan untuk didamaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat sudah berketetapan hati untuk berpisah ;

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah . tidak terpenuhi , sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas alasan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga cukup beralasan untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat,
Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari tergugat (**Anda Triandana Bin Abdul Djafar**) terhadap penggugat (**PENGUGAT Binti Ekot Sunaryo**)

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 22 Januari 2021 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 12 November 2010, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;

• Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena 1. Antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat dan Penggugat belum Dikaruniai Keturunan

- 2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga yang sakkinah, mawadah warohmah, selalu ada perbedaan pendapat
- 3. Tergugat Mempunyai wanita idaman lain (Wil)
- 4. Tergugat memiliki sifat emosi, dimana jika terjadi perselisihan sering berkata kasar kepada penggugat.;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Januari 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 12 November 2010, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena 1. Antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat dan Penggugat belum Dikaruniai Keturunan
- 2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga yang sakkinah, mawadah warohmah, selalu ada perbedaan pendapat
- 3. Tergugat Mempunyai wanita idaman lain (Wil)
- 4. Tergugat memiliki sifat emosi, dimana jika terjadi perselisihan sering berkata kasar kepada penggugat.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Januari 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 November 2010 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2018 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena 1. Antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat dan Penggugat belum Dikarunia Keturunan

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga yang sakkinah, mawaddah warohmah, selalu ada perbedaan pendapat

3. Tergugat Mempunyai wanita idaman lain (Wil)

4. Tergugat memiliki sifat emosi, dimana jika terjadi perselisihan sering berkata kasar kepada penggugat., yang puncaknya sejak Bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Bulan November 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena 1. Antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat dan Penggugat belum Dikaruniai Keturunan

2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga yang sakkinah, mawadah warohmah, selalu ada perbedaan pendapat

3. Tergugat Mempunyai wanita idaman lain (Wil)

4. Tergugat memiliki sifat emosi, dimana jika terjadi perselisihan sering berkata kasar kepada penggugat., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan November 2018 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 597.000,00, (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Drs. Ahmad Nur, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti,
S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
•	Redaksi	: Rp 10.000,00
•	Meterai	: Rp 12.000,00
J u m l a h		: Rp 597.000,00

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 6068/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)